



Program Keluarga Harapan (PKH) dan Upaya Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Sidorejo Hilir, Medan Tembung

Desinta¹, Rhyfka Arlina Bago², Yohana Sinurat³, Hulman Panjaitan^{4*}, Josua Armando Tamba⁵, Julia Ivanna⁶

¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: desintadesinta089@gmail.com¹, rhyfkaarlinaa@gmail.com², yohanasinurat09@gmail.com³, hulman060805@gmail.com^{4*}, armandojosua133@gmail.com⁵, juliaivanna@unimed.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: hulman060805@gmail.com

Abstract: This study investigates the implementation of the Family Hope Programme (PKH) in Sidorejo Hilir Sub-district, Medan Tembung District, Medan City, as part of the government's efforts to reduce poverty. The study focuses on the methods used to implement the PKH, the constraints and difficulties encountered during its implementation, and how the programme has impacted the socio-economic conditions of beneficiary families. This research employs a descriptive qualitative approach to collect data through interviews, observations, and documentation with village officials, PKH facilitators, and Beneficiary Families (KPM). The research findings indicate that the implementation mechanism of the PKH in Sidorejo Hilir Sub-district has followed the procedures for data collection via the DTKS, verification, selection of beneficiary families, and the provision of assistance on a regular basis, as well as fulfilling responsibilities in the fields of education and health. The PKH has been shown to reduce the expenditure burden on poor families, improve access to education and health care, and encourage behavioural changes that foster greater awareness of the importance of education and health. However, the programme still faces a number of challenges. These include inaccurate beneficiary data, delays in disbursement, a limited number of field officers, and a lack of public understanding of the programme's mechanisms and responsibilities. Overall, the PKH has made a positive contribution to poverty alleviation in Sidorejo Hilir. However, to achieve sustainable poverty alleviation, improvements are needed in data collection, coordination, support, and economic empowerment.

Keywords: Family Hope Programme; Poverty Reduction; Program Implementation; Socio-Economic Conditions; Verification.

Abstrak: Studi ini menyelidiki penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Kajian ini berfokus pada metode yang digunakan untuk menerapkan PKH, kendala dan kesulitan yang dihadapi saat melaksanakannya, dan bagaimana program berdampak pada kondisi sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan aparatur kelurahan, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidorejo Hilir telah mengikuti prosedur pendataan melalui DTKS, verifikasi, penetapan KPM, dan penyediaan bantuan secara berkala, serta tanggung jawab di bidang pendidikan dan kesehatan. PKH telah terbukti menurunkan beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Namun, program masih menghadapi beberapa hambatan. Ini termasuk sasaran data penerima yang tidak tepat, keterlambatan pencairan, jumlah pendamping yang terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan tanggung jawab program. Secara keseluruhan, PKH berkontribusi positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sidorejo Hilir. Namun, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, diperlukan perbaikan dalam hal pendataan, koordinasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi.

Kata kunci: Implementasi Program; Kemiskinan; Kondisi Sosial Ekonomi; Program Keluarga Harapan ; Verifikasi.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah sosial yang paling mendasar dan menantang dalam konteks pembangunan nasional dan global adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan ekonomi; itu juga mencakup aspek sosial, budaya, dan struktural yang saling

terkait. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Akibatnya, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi warganya yang kurang beruntung. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai kebijakan sosial untuk mengakhiri kemiskinan secara berkelanjutan (Suharto, 2009).

Kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi pembangunan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 turun dari 10,64% menjadi 10,12%, atau dari 27,77 juta menjadi 26,58 juta orang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017). Angka kemiskinan absolut masih tinggi mengingat populasi yang cukup besar di Indonesia, meskipun tren kemiskinan nasional terus menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Ini dicapai melalui berbagai program perlindungan sosial yang membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Sebagai tanggapan atas tingkat kemiskinan yang tinggi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2007. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu. Program Conditional Cash Transfer (CCT), yang dikenal secara internasional, telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di banyak negara. PKH memungkinkan keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk berkembang menjadi pusat unggulan penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

PKH bertujuan untuk memerangi kemiskinan antar generasi dan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek. PKH sangat membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) karena mereka mencegah "memproduksi" generasi berikutnya yang tidak sehat dan tidak berpendidikan. Oleh karena itu, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga sebagai investasi sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dalam jangka panjang melalui peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan (Suharto & Thamrin, 2012).

PKH efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menurut sejumlah kajian empiris. PKH terbukti memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa partisipasi atau kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH sangat menentukan keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Resina, 2023). Hasil ini

selaras dengan studi serupa di berbagai negara yang menunjukkan bahwa program transfer tunai bersyarat dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, pencapaian pendidikan, dan status kesehatan orang miskin.

Dalam konteks daerah, kemiskinan masih menjadi masalah yang nyata di Provinsi Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan. Angka kemiskinan di Sumatera Utara per September 2025 masih mencapai 7,24%, dengan Kota Medan sebagai daerah dengan populasi miskin tertinggi di provinsi (BPS Sumut, 2025). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sejumlah besar penduduk miskin di berbagai kelurahan masih belum memiliki akses yang sama ke bantuan sosial. Salah satu daerah yang mengalami masalah kemiskinan adalah Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung. Kelurahan ini merupakan daerah yang padat penduduk dan sebagian besar penduduknya berasal dari keluarga yang tidak mampu.

PKH tidak sepenuhnya berjalan mulus di tingkat kelurahan, meskipun telah menunjukkan efek positif secara nasional. Implementasi PKH masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk sasaran yang tidak tepat bagi penerima manfaat, pemahaman yang buruk tentang hak dan kewajiban peserta PKH, dan kurangnya pendampingan sosial di lapangan (Hasna, 2019). Dibutuhkan evaluasi dan pembenahan yang menyeluruh dalam pelaksanaan program PKH karena berbagai hambatan ini menyebabkan tidak semua keluarga miskin yang berhak merasakan manfaat PKH secara optimal.

Dengan mempertimbangkan masalah ini, penelitian tentang penerapan PKH di Kelurahan Sidorejo Hilir, Medan Tembung menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya program bantuan tingkat bawah, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada situasi masyarakat setempat (Soetomo., 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidorejo Hilir, seberapa tepat sasaran penerima manfaat PKH, dan seberapa besar kontribusi PKH terhadap upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan masukan bagi pemangku kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan PKH di wilayah tersebut.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung?
- b) Apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung?
- c) Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung?

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Dalam perspektif ilmu sosial, kemiskinan sering dimaknai sebagai kondisi kekurangan atau deprivasi yang dialami oleh individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut meliputi aspek material seperti pangan, sandang, dan papan, serta aspek non-material seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Menurut Suharto (2009), kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mencapai taraf hidup yang layak, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan perlindungan sosial guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kemiskinan juga dapat dilihat sebagai akibat dari ketimpangan dalam distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi dan sosial. Dalam sudut pandang ini, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu seperti rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti terbatasnya kesempatan kerja, kebijakan yang kurang inklusif, serta minimnya akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan ekonomi, tetapi juga melalui kebijakan yang menasar akar permasalahan.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memegang peran penting dalam merancang serta melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan publik sendiri merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan tersebut di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang mengadopsi konsep Conditional Cash Transfer (CCT).

Secara konseptual, PKH tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pemenuhan kewajiban tertentu. Program ini menitikberatkan pada pentingnya investasi sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Suharto & Thamrin (2012) menyatakan bahwa PKH dirancang sebagai strategi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh proses pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah,

serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Utomo (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup serangkaian kegiatan untuk merealisasikan kebijakan menjadi tindakan nyata, yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan PKH, proses ini mencakup pendataan melalui DTKS, verifikasi dan validasi data, penetapan KPM, hingga penyaluran bantuan serta pendampingan sosial.

Keberhasilan implementasi PKH dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program. Kualitas data menjadi faktor yang sangat penting karena menentukan ketepatan sasaran program. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan inclusion error (penerima yang tidak layak menerima bantuan) maupun exclusion error (keluarga miskin yang tidak menerima bantuan). Oleh sebab itu, proses verifikasi dan validasi data menjadi langkah krusial dalam menjamin efektivitas program.

Selain itu, teori pemberdayaan masyarakat juga menjadi landasan penting dalam memahami PKH. Menurut Soetomo (2006), pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks PKH, pemberdayaan diwujudkan melalui kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan keluarga. Dengan demikian, PKH tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi sosial.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, PKH dapat dipahami sebagai bentuk redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Sari (2020) menyatakan bahwa program bantuan sosial seperti PKH mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta memperkuat stabilitas ekonomi keluarga miskin. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan secara produktif.

Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan sosial juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Ketergantungan ini dapat menghambat upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Resina (2023) menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris berbasis data rumah

tangga dan menemukan bahwa keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan KPM terhadap persyaratan program, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain sebagai bantuan finansial, PKH juga berfungsi sebagai sarana perubahan perilaku sosial, di mana keluarga penerima manfaat terdorong untuk lebih memperhatikan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Namun, dampak tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

Penelitian Hasna (2019) juga mengkaji dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi, khususnya terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan program. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian penerima manfaat tidak memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas program. Oleh karena itu, peran pendamping sosial sangat penting dalam memberikan edukasi dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

Penelitian oleh Domri (2019) menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat, seperti peningkatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan dalam hal kepatuhan peserta terhadap kewajiban program. Sebagian masyarakat masih menganggap PKH sebagai bantuan tanpa syarat, sehingga tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan program dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2019) menyoroti aspek implementasi PKH, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pendataan, seperti ketidakakuratan data dan adanya unsur subjektivitas dalam penentuan penerima. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan, di mana terdapat keluarga yang tidak layak menerima bantuan tetapi tetap terdaftar, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau program. Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, terutama dalam program berbasis penargetan seperti PKH.

Dengan demikian, kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama, yaitu kemiskinan sebagai permasalahan sosial yang bersifat multidimensional, kebijakan publik sebagai instrumen intervensi pemerintah, implementasi kebijakan sebagai proses operasional, serta pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam meningkatkan

kesejahteraan. Seluruh konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah suatu cara yang diterapkan untuk membangun dasar penelitian yang ilmiah berdasarkan teori, metode, bukti, dan dilakukan secara terorganisir (Wahyudi, 2021). Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau ucapan dari orang-orang serta tingkah laku yang bisa diamati; pendekatan ini fokus pada konteks dan individu secara menyeluruh. Agar mendapatkan data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini diterapkan metode deskriptif kualitatif. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, minat, motivasi, dan tindakan dengan penyampaian dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Lokasi yang dijadikan dasar penelitian ini adalah Kantor Lurah yang terletak di Jl. Dahlia No. 33, Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam studi ini, subjek penelitian adalah Bapak Dodi yang menjabat sebagai Kasi Trantib dan Pak Irwan sebagai Staf Penanganan PKH. Dalam teks ini, variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan objek dalam pengamatan penelitian. Variabel penelitian juga sering dipahami sebagai elemen-elemen yang mempengaruhi suatu kejadian atau gejala yang menjadi fokus studi (Syahza, 2021). Variabel adalah segala yang akan diamati dalam penelitian (Suryabrata, 2010).

Tipe data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif, data primer dan sekunder merujuk pada jenis informasi yang diumpulkan oleh peneliti untuk mendukung pengembangan temuan dan kesimpulan dalam studi. Berdasarkan pendapat Bungin dalam (Rahmadi, 2011), data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber pertama di tempat penelitian atau objek yang diteliti. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau peneliti untuk tujuan yang berbeda, dan dapat ditemukan dalam sumber-sumber seperti jurnal riset, laporan dari pemerintah, basis data, buku, atau dokumen yang berkaitan dengan kejadian yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kelurahan Sidorejo Hilir adalah salah satu area pemerintahan yang terletak di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini masuk dalam daerah yang memiliki jumlah penduduk yang padat dan masyarakatnya bermacam-macam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

Secara geografis, Kelurahan Sidorejo Hilir terletak di area perkotaan yang sedang berkembang, ditunjukkan dengan semakin banyaknya pemukiman, kegiatan ekonomi warga kecil, serta adanya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pelaku jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang berada di kategori ekonomi menengah ke bawah, sehingga menjadi target utama dari berbagai program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam hal sosial dan ekonomi, masih ada keluarga yang masuk kategori miskin atau berisiko miskin, yang ditunjukkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta penghasilan yang tidak tetap. Oleh karena itu, Kelurahan Sidorejo Hilir menjadi salah satu area yang mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah orang yang miskin secara perlahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorejo Hilir menunjukkan bahwa program tersebut sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Data penelitian didapat dengan cara mewawancarai, mengamati, dan mencatat dokumen dari pihak-pihak terkait, seperti pendamping PKH, aparaturnya, serta masyarakat yang menerima manfaat.

Penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan pengaruh baik terhadap kondisi ekonomi keluarga yang menerima manfaat. Bantuan yang diberikan secara teratur bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok, khususnya dalam hal pendidikan anak dan akses terhadap layanan kesehatan. Banyak keluarga yang menerima bantuan PKH mengatakan bahwa bantuan tersebut membantu mereka untuk membiayai kebutuhan sekolah anak, misalnya membeli alat belajar dan membayar biaya antar-jemput. Selain itu, dari segi sosial, PKH juga mendorong perubahan cara berpikir masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah anak yang hadir di sekolah serta peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan oleh ibu hamil dan balita.

Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti masih terdapat data penerima yang tidak tepat sasaran, pencairan bantuan yang terlambat, serta kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai cara kerja program tersebut. Di sisi lain, peran pendamping PKH dianggap cukup penting dalam memberikan pemahaman dan memastikan program berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Secara keseluruhan, PKH di Kelurahan Sidorejo Hilir sudah membantu mengurangi kemiskinan, tetapi masih perlu diperbaiki dalam hal pengumpulan data, kerja sama antar lembaga, serta pemberian informasi kepada masyarakat agar program ini bisa berhasil dengan baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Hilir merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan berupa materi, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dan berkelanjutan.

Proses pelaksanaan PKH diawali dengan kegiatan pendataan masyarakat miskin yang dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi masyarakat secara umum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dijadikan dasar utama dalam menentukan calon penerima bantuan. Oleh karena itu, keakuratan dan pembaruan data menjadi hal yang sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan (Utomo, 2014).

Setelah proses pendataan selesai, tahapan berikutnya adalah verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan aparat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Proses verifikasi biasanya melibatkan perangkat kelurahan serta pihak lain yang memahami kondisi masyarakat, sehingga hasilnya dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keluarga yang telah melewati proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah itu, mereka akan menerima bantuan yang dapat berupa bantuan tunai maupun non-tunai, yang disalurkan melalui lembaga resmi seperti bank atau kantor pos. Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga penerima manfaat dapat mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain menerima bantuan, KPM juga diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam program PKH. Persyaratan tersebut antara lain memastikan anak tetap bersekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita secara rutin, serta mengikuti kegiatan pembinaan atau peningkatan kapasitas keluarga. Ketentuan ini menjadi ciri khas PKH sebagai program bantuan bersyarat, di mana bantuan yang diberikan juga disertai dengan upaya untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan program ini, pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting. Pendamping bertugas memberikan informasi dan sosialisasi mengenai program, melakukan pengawasan terhadap penerima manfaat, serta membimbing mereka agar dapat memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Selain itu, pendamping juga berperan sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan keluarga, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidorejo Hilir dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mekanisme yang baik ini menjadi dasar penting dalam upaya mencapai tujuan utama PKH, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidorejo Hilir, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Meskipun secara konsep PKH telah dirancang dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, dalam praktiknya di lapangan masih sering ditemukan berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Salah satu hambatan utama yang sering terjadi adalah ketidaktepatan data penerima bantuan. Data yang digunakan dalam program PKH sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Akibatnya, terdapat keluarga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tetapi masih terdaftar

sebagai penerima, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Selain masalah data, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme PKH juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap bantuan yang diterima sebagai hak sepenuhnya tanpa memahami adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan program, seperti kewajiban menyekolahkan anak atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Domri, 2019).

Keterbatasan jumlah pendamping PKH juga menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program. Jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah KPM membuat proses pendampingan, pembinaan, dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, tidak semua penerima manfaat mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai.

Selain itu, faktor sosial seperti sikap ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagian masyarakat cenderung mengandalkan bantuan yang diberikan tanpa berusaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Kondisi ini dapat menghambat tujuan jangka panjang program dalam menciptakan masyarakat yang mandiri. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan subjektivitas dalam proses pendataan, misalnya karena adanya hubungan kedekatan antara aparat dengan calon penerima bantuan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, karena tidak semua masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dapat terakomodasi dengan baik (Sasmito, 2019). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, seperti peningkatan akurasi dan pembaruan data, penguatan peran pendamping, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tujuan program. Tanpa adanya upaya perbaikan tersebut, efektivitas PKH dalam mengentaskan kemiskinan akan sulit tercapai secara optimal.

Dampak Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sidorejo Hilir. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi ekonomi, PKH membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penting seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan lainnya. Dengan

adanya bantuan tersebut, kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum mereka menerima bantuan (Sari, 2020).

Selain itu, PKH juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dengan adanya tambahan bantuan, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga serta mengurangi risiko mereka jatuh ke dalam kondisi kemiskinan yang lebih dalam. Dalam bidang pendidikan, PKH berperan penting dalam meningkatkan partisipasi anak-anak untuk bersekolah. Bantuan yang diberikan membantu orang tua dalam memenuhi biaya pendidikan, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dan tidak putus sekolah.

Dari aspek sosial, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping PKH memberikan dampak positif dalam membentuk pola pikir masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Namun demikian, dampak positif tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat. Masih terdapat keluarga yang belum mengalami perubahan signifikan dalam kondisi ekonominya, yang disebabkan oleh penggunaan bantuan yang kurang tepat atau keterbatasan dalam mengelola keuangan keluarga. Selain itu, munculnya ketergantungan terhadap bantuan juga menjadi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan PKH tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga dapat menghambat tujuan jangka panjang program dalam mengentaskan kemiskinan.

Secara keseluruhan, PKH memberikan dampak yang cukup positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya lanjutan seperti program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesadaran masyarakat agar mampu mandiri secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di Kelurahan Sidorejo Hilir, program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya telah berjalan dengan baik, dimulai dari pendataan melalui DTKS, verifikasi dan validasi, penetapan KPM, dan pemberian bantuan tunai secara berkala. Peran aparat kelurahan dan pendamping PKH, yang melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan kepada keluarga penerima

manfaat tentang pemenuhan kewajiban pendidikan dan kesehatan, didukung dalam pelaksanaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa PKH telah diterapkan di tingkat kelurahan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial yang cukup terorganisir secara administratif dan prosedural.

Program masih menghadapi banyak masalah yang mengurangi kinerjanya selama proses implementasinya. Kendala tersebut antara lain akurasi data penerima yang belum optimal, sehingga masih terdapat penerima yang kurang tepat sasaran dan keluarga miskin yang belum terjangkau. Faktor penghambat lainnya yang perlu ditangani adalah sikap ketergantungan terhadap bantuan, jumlah pendamping yang terbatas, dan pemahaman yang buruk tentang hak dan kewajiban KPM.

PKH menguntungkan kondisi sosial-ekonomi KPM, terutama dengan membantu pemenuhan kebutuhan dasar, biaya sekolah anak, dan akses ke layanan kesehatan ibu hamil dan balita. Program ini meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin, mendorong orang masuk sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Karena beberapa keluarga belum memanfaatkan bantuan secara efektif dan tetap bergantung pada program, dampak PKH belum merata. Oleh karena itu, aspek pemberdayaan harus ditingkatkan agar PKH benar-benar dapat memecahkan mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah kelurahan dan instansi terkait perlu secara teratur meningkatkan akurasi dan pembaruan data DTKS serta melibatkan masyarakat secara aktif untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada penerima benar-benar tepat sasaran. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas dan jumlah pendamping PKH, serta program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada KPM tentang hak, kewajiban, dan pengelolaan bantuan untuk mengurangi sikap ketergantungan. Lebih lanjut, PKH harus disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan usaha mikro dan akses permodalan, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara finansial.

DAFTAR REFERENSI

- BPS. (2017). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Sumut. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

- Domri, D. R. (2019). Eektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 1-16.
- Hasna, N. M. (2019). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. . *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Resina, D. K. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence from Districts. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(2), 278–28.
- Sari, A. S. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Dalam perspektif The Most Significant Change Technique (MSCT). *AdministrativA: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, 2(3), 373-382.
- Sasmito, C. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 68-74.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto & Thamrin. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 3(1), 1–12.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. . Pekanbaru: Unri Press.
- Utomo, D. H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri) . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29-34.
- Wahyudi, A. D. (2021). *Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Proposal Dan Skripsi)*. Medan: Publishing Format.